

**PENGELOLAAN PARIWISATA PANTAI PULAU DATUK OLEH DINAS KEBUDAYAAN
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAYONG UTARA**

AZAN SYAPUTRA

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura
E-mail : azan_syaputra@yahoo.com

ABSTRAK

Berdasarkan masalah yang terjadi dan berkaitan dengan pengelolaan pariwisata di Pantai Pulau Datuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, yaitu sarana dan prasarana belum memadai, belum ada pengusaha pariwisata (investor), dan kurangnya partisipasi masyarakat. Sehingga, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengelolaan pariwisata di Pantai Pulau Datuk yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam Kabupaten Kayong Utara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata di Pantai Pulau Datuk yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara masih dalam proses pelaksanaan pembangunan. Namun, dalam pelaksanaan programnya masih terdapat kendala yang menjadi penghambat proses pembangunan dalam pengelolaan pariwisata tersebut. Adapun saran dari penelitian ini yaitu kepada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara melakukan musyawarah bersama instansi-instansi terkait dalam hal pengelolaan pariwisata dan mencari solusi penyelesaian masalah yang ada. Kemudian perlu melakukan komunikasi dan koordinasi antar instansi. Selanjutnya melakukan promosi program-program unggulan dari objek wisata secara bertahap, agar bisa menarik perhatian banyak orang dan pengusaha pariwisata (investor). Dan melakukan sosialisasi secara rutin tentang manfaat dan tujuan pengelolaan pariwisata kepada masyarakat Kabupaten Kayong Utara.

Kata Kunci : *Peranan, Pengelolaan Pariwisata.*

ABSTRACT

Based on the problems that occur and are associated with the management of tourism Pantai Pulau Datuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, the infrastructure is inadequate, there is no tourism entrepreneurs (investors), and lack of community participation. Thus, this research aimed to determine the management of tourism Pantai Pulau Datuk conducted by the Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam Kabupaten Kayong Utara. Based on the results of the research indicate that the management of tourism Pantai Pulau Datuk conducted by the Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam Kabupaten Kayong Utara is still in the process of implementation. However, in the implementation of the program, there are still obstacles to be inhibiting the development process in the tourism management. The suggestion from this research that the Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara did deliberation with local authorities in managing tourism and find solutions problem existing settlement. Then the necessary communication and coordination among agencies. Further promotion of flagship programs attractions in phases, in order to attract the attention of many people and tourism entrepreneurs (investors). And socialize on a regular basis about the benefits and management objectives for the tourism Kabupaten Kayong Utara.

Keyword : *Role, Management of Tourism.*

A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 1 ayat (3) menjelaskan “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”. Sedangkan Pasal 1 ayat (1) menjelaskan “Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara”, dan pada Pasal 1 ayat (2) menjelaskan “Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata”.

Mengacu pada hal tersebut, Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pariwisata khususnya di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara harus memperhatikan aspek-aspek yang terkandung di dalam pariwisata tersebut, sehingga tujuan dari Pemerintah Daerah untuk melestarikan potensi sumber daya alam yang ada di daerah akan tercapai dengan baik.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Pasal 3 huruf (a) yang berbunyi “Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata”.

Pemerintah dalam pengelolaan pariwisata khususnya di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara harus memperhatikan aspek-aspek yang terkandung di dalam pariwisata, sehingga tujuan dari pemerintah daerah untuk melestarikan potensi sumber daya alam dapat tercapai sesuai dengan UU RI Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi “Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,

kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan”.

Pemilihan sektor pariwisata oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagai salah satu sektor unggulan dalam pembangunan daerah, bukan sekedar hanya memilih, tetapi berdasarkan atas pertimbangan kapabilitas dan potensi kepariwisataan, sehingga pilihan itu secara konsisten dapat diwujudkan.

Dengan demikian, kewajiban pemerintah sebagai suatu daerah otonom yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat ditunaikan dengan baik, termasuk menentukan sektor unggulan yang akan memberikan dampak positif pada daerah dan masyarakat daerah Kabupaten Kayong Utara.

Untuk menunaikan kewajiban tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara telah membentuk sebuah dinas yang secara khusus melaksanakan peran dan fungsi mengatur, memfasilitasi, dan melaksanakan urusan kepariwisataan daerah. Dinas dimaksud, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang mengemban tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.

Dalam hal ini Kabupaten Kayong Utara memiliki taman wisata yang sering dikunjungi oleh masyarakat dan wisatawan asing, yakni Pantai Pulau Datuk yang tepatnya berada di Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Pantai Pulau Datuk adalah salah satu taman wisata

alam di Kabupaten Kayong Utara yang ramai dikunjungi.

Dan pantai ini juga dapat disebut sebagai tempat wisata yang paling banyak pengunjungnya. Tiap tahun wisata pantai ini menarik perhatian ribuan pengunjung yang datang dari berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Kayong Utara bahkan juga pengunjung dari kabupaten lain.

Namun, sejauh ini Pantai Pulau Datuk masih memiliki beberapa masalah dalam pengelolaannya. Hal ini ditunjukkan dari data Laporan Akhir Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara mengenai Pantai Pulau Datuk Kabupaten Kayong Utara tahun 2009 menjelaskan tentang desain bangunan untuk program fasilitas utama dan fasilitas pelengkap antara lain kolam sepeda air, kolam pancing, kolam renang, tempat bermain anak, lapangan layang-layang, pujasera, toko souvenir, panggung terbuka, parkir mobil, parkir sepeda motor, parker bis, sangkar burung, restoran diatas air, penginapan (*cottage*) diatas air, dermaga, jalan panjang menuju dermaga (*jetty*), mushola, gasebo, dan wc umum.

Tetapi dari program tersebut sebagian besar masih belum terlaksana, sehingga menimbulkan dampak-dampak dalam proses pengelolaan pariwisata di Pantai Pulau Datuk Kabupaten Kayong Utara seperti sarana dan prasarana belum memadai, belum adanya pengusaha pariwisata (investor) yang bekerja sama dengan instansi terkait untuk membangun usaha-usaha pariwisata, dan kurangnya partisipasi masyarakat, sehingga proses pengelolaan pariwisata masih belum bisa dilaksanakan secara optimal.

Dan dari permasalahan diatas, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara memiliki peran dalam pelaksanaan program tersebut, karena program-program yang telah direncanakan merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi dinas, yaitu termasuk dalam bidang pariwisata. Oleh sebab itu, Dinas

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara harus bekerja keras lagi agar bisa lebih fokus dalam pengelolaan pariwisata demi terciptanya kesejahteraan umum, khususnya dalam teknik manajemen kepengelolaannya.

Disisi yang lain, partisipasi masyarakat yang merupakan keikutsertaan sekelompok orang dalam suatu lingkungan harus dapat dimanfaatkan untuk membantu kegiatan-kegiatan yang telah memiliki perencanaan demi mencapai tujuan tertentu. Dari perencanaan pembangunan yang ada dan target pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tentunya memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat pada umumnya.

Masyarakat akan terdorong untuk membantu apabila mereka mengetahui apa yang perlu mereka bantu dan alasan apa mereka terlibat dalam kegiatan pemerintah. Mereka akan tertarik untuk ikut mendukung pembangunan pariwisata apabila mereka telah memahami bahwa mereka akan mendapatkan manfaat yang positif.

Adapun fokus penelitian pada ruang lingkup pariwisata, yaitu mengeksplorasi, mengidentifikasi, dan menganalisis kepengelolaan pariwisata di Pantai Pulau Datuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara.

Dari uraian latar belakang dan fokus penelitian yang ada dalam penelitian ini, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu bagaimana pengelolaan pariwisata di Pantai Pulau Datuk yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara ?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan pariwisata di Pantai Pulau Datuk yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Pengelolaan Pariwisata

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan bagian yang memiliki keterkaitan dalam urusan tentang Pemerintahan Daerah. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (5) menjelaskan “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan Pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya penyerahan wewenang kepada daerah menjadi landasan bagi pembentukan pemerintah lokal, yaitu kabupaten dan kota sebagai Pemerintahan Daerah yang berdaulat dan dibentuk secara politis berdasarkan undang-undang serta memiliki lembaga-lembaga yang menjalankan pemerintahan dan dilengkapi dengan kewenangan membuat peraturan yang ada dalam wilayah kekuasaannya.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab atas perkembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada diwilayah kekuasaannya. Khususnya untuk Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang secara jelas terlibat dalam pengelolaan pariwisata karena memiliki tugas pokok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja, yakni mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga dilingkup Kabupaten Kayong Utara.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) menjelaskan “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa “Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan”.

Pada penjelasan Pasal Demi Pasal khususnya Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dalam ketentuan ini sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata”. Dan dari pernyataan tersebut menegaskan bahwa sektor pariwisata merupakan bagian dari potensi unggulan daerah yang termasuk ke dalam urusan pemerintahan daerah dengan tujuan agar bisa dikelola dengan baik dan benar.

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata (Brantas, 2009:4). Dari pernyataan tersebut, peneliti menegaskan bahwa teori manajemen sangat penting dalam suatu organisasi demi mencapai tujuan yang telah ditentukan, sebab manajemen sangat berpengaruh dalam penentuan hasil yang akan dicapai, salah satunya terhadap pengelolaan

pelaksanaan kegiatan yang sudah menjadi tugas dan kewajiban organisasi.

Selain itu, dalam melakukan pekerjaan yang akan diselesaikan, manajer sebagai pelaksana ataupun pengelola di suatu organisasi harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen, terdiri dari *planning*, *organizing*, *staffing*, *motivating*, dan *controlling* (Brantas, 2009:19).

Dalam hal ini, peneliti memfokuskan pada manajemen organisasi (*organizing*), sebab sangat berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti dan dibahas oleh peneliti, yakni mengenai peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam pengelolaan pariwisata di Pantai Pulau Datuk, Desa Sutura, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka peneliti setuju dengan dua dari empat pernyataan istilah pengorganisasian menurut Handoko (dalam Brantas, 2009:74), karena sangat berhubungan erat dengan masalah yang diteliti. Handoko mengatakan bahwa :

- a. Hubungan antara fungsi, jabatan, tugas karyawan;
- b. Cara manajer membagi tugas yang harus dilaksanakan dalam departemen dan mendelegasikan wewenang untuk mengerjakan tugas tersebut.

Dalam pengelolaan pariwisata yang baik dan benar, tentunya pemerintah daerah telah membuat kebijakan sebagai dasar hukum dalam pelestarian potensi unggulan daerah dengan tujuan agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan perkembangan daerah itu sendiri.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah membuat kebijakan untuk pengelolaan pariwisata daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Pasal 3 huruf (a) yang berbunyi

“Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata”.

Namun, pada tahap implementasi kebijakan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Kayong Utara, khususnya di Pantai Pulau Datuk belum berjalan secara optimal, dikarenakan adanya beberapa kendala yang menghambat proses pengelolaan pariwisata tersebut.

Adapun kendala tersebut diketahui dari data Laporan Akhir Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara mengenai Pantai Pulau Datuk Kabupaten Kayong Utara tahun 2009 yang menjelaskan tentang desain bangunan untuk program fasilitas utama dan fasilitas pelengkap belum sepenuhnya terlaksana secara keseluruhan dan menimbulkan beberapa dampak dan menjadi permasalahan. Adapun beberapa masalah yang menjadi perhatian umum yaitu :

1. Sarana dan prasarana belum memadai.
2. Belum ada investor.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat.

Untuk itu perlu diketahui bagaimana manajemen Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam pengelolaan pariwisata di Pantai Pulau Datuk Kabupaten Kayong Utara, sehingga mengamati proses manajemen tersebut dapat dilihat dari salah satu unsur manajemen yaitu *organizing*.

Untuk mengamati proses manajemen pengelolaan pariwisata di Pantai Pulau Datuk yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara dapat digunakan teori manajemen organisasi yang dikemukakan oleh Handoko. Menurut Handoko (dalam Brantas, 2009:74) mengemukakan tentang istilah pengorganisasian adalah :

1. Hubungan antara fungsi, jabatan, tugas karyawan;
2. Cara manajer membagi tugas yang harus dilaksanakan dalam departemen dan mendelegasikan wewenang untuk mengerjakan tugas tersebut.

Dari kedua pernyataan diatas, dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk diuji, melainkan sebagai pedoman yang akan digunakan pada saat turun ke lapangan untuk melaksanakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menerapkan analisis jenis penelitian deskriptif guna mengeksplor dan mengidentifikasi manajemen organisasi terhadap Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam Pengelolaan Pariwisata di Pantai Pulau Datuk Kabupaten Kayong Utara.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menerapkan metode penelitian kualitatif dalam analisis dan eksplorasi informasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2009:6).

Bagian deskriptif, bagian ini adalah bagian terpanjang yang berisi semua peristiwa dan pengalaman yang didengar dan dilihat serta dicatat selengkap dan seobjektif mungkin (Moleong, 2009:211). Oleh sebab itu peneliti memilih jenis penelitian deskriptif, karena dengan metode ini hasil penelitian dapat digambarkan dengan keadaan yang sebenarnya atas fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat dan diuraikan dengan rinci.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk memilih dan menentukan subjek sebagai informan tentu saja memiliki persyaratan, yaitu ia harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang bertikai dalam latar

penelitian, dan mempunyai pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi (Moleong, 2009:132).

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti dapat menentukan subjek penelitian yang terkait terhadap peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam pengelolaan pariwisata di Pantai Pulau Datuk, Desa Sutura, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah :

- 1) Seorang pemimpin organisasi ataupun instansi terkait yang dianggap tahu mengenai kebijakan, implementasi kebijakan, program kerja, dan kinerja yang berhubungan dalam pengelolaan pariwisata yang ada di Kabupaten Kayong Utara, sehingga secara umum sangat dibutuhkan sebagai informan. Dan dalam hal ini informan tersebut adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- 2) Seorang wakil pimpinan organisasi tentu juga berperan penting dalam pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi dinas, sehingga sangat berpengaruh untuk melengkapi informasi mengenai pengelolaan pariwisata di Kabupaten Kayong Utara, maka peneliti memilih Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai informan.
- 3) Seseorang yang mengetahui secara rinci mengenai potensi sumber daya alam Kabupaten Kayong Utara dalam hal kebudayaan dan pariwisatanya adalah subjek yang paling bermanfaat untuk dijadikan sebagai informan, untuk itu peneliti memilih Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebagai informan.
- 4) Seseorang yang memiliki pengetahuan umum mengenai sejarah dari Pantai Pulau Datuk dianggap penting kedudukannya untuk dijadikan sebagai informan, sehingga peneliti memilih satu orang tokoh masyarakat untuk dijadikan informan.
- 5) Orang-orang yang secara langsung melakukan pengamatan dan penilaian terhadap sumber daya

alam, khususnya potensi yang ada di Pantai Pulau datuk merupakan subjek yang sangat berpengaruh informasinya terhadap penelitian, sehingga peneliti memilih dua orang wisatawan sebagai informan.

Sedangkan objek penelitian yang akan diteliti adalah pengelolaan pariwisata di Pantai Pulau Datuk Desa Sutera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara yang secara khusus menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- 1) Dalam upaya memperoleh data dengan mengadakan pengamatan terhadap masalah yang diteliti yaitu langsung ke lokasi dengan melihat dari dekat kenyataan yang ada dan yang terjadi pada objek penelitian, maka peneliti menggunakan teknik observasi.
- 2) Untuk mengumpulkan data atau informasi dengan melakukan tanya jawab langsung kepada informan yang mengetahui masalah yang akan diteliti, maka dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara.
- 3) Untuk mengumpulkan data dari instansi terkait, yang sebagian besar data yang dibutuhkan adalah bentuk surat-surat, monografi, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka peneliti menggunakan teknik dokumentasi yang lebih mengarah pada arsip data.

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2010:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang merupakan suatu teknik pengolahan data yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan dari para narasumber yang diteliti. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.

Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang, sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori (Sugiyono, 2010:245).

Teknik analisis kualitatif terdiri dari tahap-tahap (Sugiyono, 2010:247-252) :

- 1) Reduksi data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian ditulis dalam bentuk uraian dan akan terus bertambah, sehingga diperlukan reduksi data yaitu dengan menyisihkan data yang tidak diperlukan. Disamping itu pula dilakukan kegiatan merangkum dan memilih data yang mempunyai kesamaan tema serta disusun secara sistematis, sehingga mempermudah penggunaannya.

- 2.) Penyajian data (*data display*)

Penyajian dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara menyeluruh atau bagian-bagian tertentu untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Oleh karena itu, agar data dapat dilihat secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian ini, maka peneliti menyajikan data dalam bentuk menarik, bagan atau uraian naratif.

- 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Peneliti berusaha untuk mencari makna dari data yang telah diperoleh, hal ini dilakukan sejak peneliti mulai memasuki lapangan dan proses pengumpulan data terus mencari pola, tema,

hubungan, persamaan serta hal-hal yang sering timbul yang berhubungan dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Walaupun data yang didapat bukti-buktinya masih kurang dan masih diragukan kebenarannya. Akan tetapi melalui verifikasi selama penelitian berlangsung dapat ditarik kesimpulan yang lebih kredibel. Verifikasi dilakukan dengan mencari data baru untuk mendukung, sehingga diperoleh kesimpulan yang lebih valid.

Untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Moleong (2011:330) mendefinisikan bahwa "Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu".

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa teknik triangulasi dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan melalui sumber lainnya, dalam arti mengecek data yang diperoleh dari beberapa informan, kemudian data tersebut dicek kembali kepada informan lainnya.

Dari uraian diatas, maka dalam penelitian ini data hasil wawancara antara informan yang satu dengan informan lainnya akan dibandingkan, serta membandingkan hasil-hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang berkaitan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 1 ayat (3) menjelaskan "Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah".

Berkean dengan hal tersebut, untuk pengelolaan pariwisata di Pantai Pulau Datuk Kabupaten Kayong Utara disesuaikan dan

diseimbangkan dengan keadaan potensi unggulan daerah, yang dalam hal ini peran tersebut diambil alih oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara sebagai unsur pelaksana (implementator) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memiliki peran sebagai pelaku utama dalam pengelolaan tersebut, tetapi salah satu cara pengembangan pariwisata tentunya ada pihak kedua yang harus membuat usaha-usaha pariwisata untuk menanamkan modal di lokasi pariwisata agar bisa memberikan kontribusi kepada daerah, yang dalam hal ini di ambil alih oleh pihak swasta sebagai pengusaha pariwisata.

Sebagaimana telah tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 1 ayat (7) menjelaskan "Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata", dan pada Pasal 1 ayat (8) menjelaskan "Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata".

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa peran swasta juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan pariwisata dengan menanamkan modalnya sebagai investasi untuk membuat usaha-usaha yang bermanfaat dapat menarik perhatian para pengunjung sebagai wisatawan, baik dari wisatawan lokal maupun wisatawan asing.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan selama peneliti melaksanakan penelitian dilapangan, dapat diketahui bahwa pengelolaan pariwisata di Pantai Pulau Datuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong masih dalam proses pengembangan. Dan dalam proses

ini masih ditemukan kendala-kendala yang dialami oleh pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai implementator dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Kayong Utara.

Mengawali wawancara dengan H. Gunawan, S.Pd (52) selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara, beliau menyampaikan bahwa :

Pengelolaan pariwisata merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan sumber daya yang ada sesuai peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap objek-objek yang memiliki manfaat yang begitu besar bagi lingkungan seperti Pantai Pulau Datuk. Dari sumber daya inilah yang dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah karena menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat digunakan kembali untuk perkembangan dan kemajuan daerah (19 September 2012).

Lebih lanjut beliau menjelaskan :

Namun, banyak sekali kendala yang harus dihadapi dalam pengelolaan ini, seperti masalah di anggaran dana yang masih kurang untuk pengelolaan ini, dan investor atau pihak swasta juga belum ada yang berani untuk menanamkan modalnya di daerah ini, terlebih juga karena masalah status tanah milik masyarakat yang kebanyakan berada di pesisir pantai, sehingga rencana pada saat ini hanya difokuskan pada pembangunan jalan pantai (19 September 2012).

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa pengelolaan pariwisata ini tidaklah mudah untuk dilaksanakan. Banyak sekali kendala-kendala yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Tetapi, sejauh ini proses pengelolaan sudah berjalan dengan baik dan pelaksanaannya mengacu kepada peraturan yang berlaku.

Kebijakan terhadap pengelolaan pariwisata di Pantai Pulau Datuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dalam pelaksanaannya tergolong masih belum optimal untuk mencapai keberhasilan.

Hal ini disampaikan dari hasil wawancara kepada Hafiar, SE (49) selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara, beliau mengatakan bahwa :

Dalam proses perkembangan untuk pengelolaan pariwisata masih belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang ditunjukkan dengan masih kurangnya koordinasi antara atasan dan bawahan, sehingga manajemen yang diterapkanpun tidak bisa berjalan secara maksimal. Selain itu, kendala dilapangan juga sangat menghambat perkembangan pariwisata yang ada, seperti sarana dan prasarana yang belum lengkap dan masih dalam tahap pembangunan, serta status tanah di sekitar lingkungan pantai pulau datuk masih menjadi hak milik masyarakat setempat (17 September 2012).

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa :

Pengelolaan pariwisata sangat penting dilakukan demi menunjang sumber daya yang ada agar lebih tumbuh dan berkembang di daerah, karena sumber daya tersebut merupakan aset daerah yang ke depannya bisa memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah khususnya untuk Kabupaten Kayong Utara (17 September 2012).

Hal ini juga ditegaskan lewat wawancara kepada Amran, A.Md.Pd (54) selaku Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara yang mengatakan bahwa :

Masih kurangnya koordinasi antar pelaku pariwisata baik pemerintah maupun swasta, sehingga pelaksanaan kegiatan promosi objek-objek wisata tidak maksimal. Hal tersebut juga disebabkan oleh masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang kebudayaan dan pariwisata, yang mengakibatkan rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap peninggalan-peninggalan sejarah dan budaya. Selain itu, pembangunan kebudayaan dan pariwisata belum bisa dikelola untuk menjadi sektor unggulan sebagaimana sektor-sektor lainnya, yang dikarenakan rendahnya dukungan pendanaan (13 September 2012).

Dengan berbagai pernyataan dari pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara, sebagian besar menjelaskan

bahwa telah terjadi banyak kendala dalam proses pengelolaan pariwisata di Pantai Pulau Datuk, yang ditandai dengan kurangnya sarana dan prasarana, status tanah di pesisir pantai masih menjadi hak milik masyarakat setempat, rendahnya anggaran dana untuk pembangunan, dan belum adanya pihak swasta yang berani menanamkan modal usaha di lokasi tersebut.

Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah untuk lebih peduli terhadap permasalahan kecil namun berakibat besar dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat umum. Sebab, semua perencanaan pembangunan di Kabupaten Kayong Utara adalah dengan tujuan yang sama yakni demi kesejahteraan masyarakatnya dan bukan untuk kesejahteraan individu atau perorangan.

Berdasarkan data data Laporan Akhir Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara mengenai Pantai Pulau Datuk Kabupaten Kayong Utara tahun 2009 yang menjelaskan tentang desain bangunan untuk program fasilitas utama dan fasilitas pelengkap belum bisa dilaksanakan secara optimal, karena banyak kendala-kendala yang dialami oleh pihak instansi terkait dalam pelaksanaan program ini, sehingga program-program yang sudah direncanakan dan akan dilaksanakan menjadi terhambat ataupun tertunda.

Adapun permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan pariwisata di Pantai Pulau Datuk Kabupaten Kayong Utara sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana belum memadai

Dengan keadaan seperti ini, maka kegiatan wisata yang dilaksanakan oleh wisatawan baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan asing merasa terbatas, dikarenakan fasilitas yang ada di taman wisata juga terbatas atau belum memadai.

2. Belum adanya pengusaha pariwisata (investor)

Jika pihak investor belum ada untuk bekerja sama dengan instansi terkait, maka pengelolaan pariwisata juga akan mengalami keterbatasan-keterbatasan dalam bidang-bidang tertentu, karena

pihak instansi sebagai unsur pelaksana juga memiliki tugas lain selain hanya pada pengelolaan pariwisata itu sendiri. Oleh dari itu, dibutuhkan kerjasama antara instansi terkait dengan pihak investor, karena pengusaha pariwisata (investor) merupakan faktor penting dalam pengelolaan pariwisata, dengan kehadiran pengusaha ini yang menanamkan modalnya di suatu objek wisata, maka kebutuhan utama seperti sarana dan prasarana setidaknya bisa terpenuhi sesuai dengan kebutuhan wisatawan, dan promosi objek wisata inipun akan semakin lancar untuk diproses, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

3. Kurangnya partisipasi masyarakat

Dengan kurangnya partisipasi masyarakat, maka akan berpengaruh pada tahap pembangunan dan pengembangan pariwisata di daerah. Sebab, pengaruh masyarakat juga sangat besar dalam menentukan kemajuan daerahnya. Misalnya seperti status tanah yang ada di daerah pesisir pantai adalah hak milik masyarakat setempat, sedangkan pemerintah daerah memiliki rencana pembangun di kawasan tersebut, dan masyarakat yang tidak mengerti maksud dan tujuan pembangunan ini secara refleksi akan menolak dan tidak akan mendukung proses pembangunan tersebut dilanjutkan. Oleh dari itu, untuk melibatkan masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di daerah, maka Pemerintah Daerah juga harus memikirkan cara yang tepat dan benar untuk menjelaskan kepada masyarakat agar mengerti maksud dan tujuan dari pengelolaan pariwisata.

Menanggapi hal tersebut, dari hasil wawancara yang ditujukan kepada H. Sarifuddin, SE (54) sebagai tokoh masyarakat di Kabupaten Kayong Utara dan selaku Bagian Perlengkapan Umum Sekrterariat Daerah Kabupaten Kayong Utara, beliau mengatakan bahwa :

Pengelolaan pariwisata yang masih dalam proses pembangunan tidak hanya memperhatikan bagaimana kedepannya bisa mendapat keuntungan dari usaha-usaha pariwisata, seharusnya juga bisa menunjukkan

sesuatu yang memperlihatkan tentang ciri khas daerah dengan sejarah, agar tempat pariwisata yang dikunjungi oleh wisatawan tidak hanya kagum terhadap objek wisata daerah tersebut, tetapi juga kagum terhadap nilai-nilai sejarah yang ada, karena Kabupaten Kayong Utara terbentuk merupakan bagian dari hasil jerih payah para pejuang-pejuang kerajaan tempo dulu. Ada beberapa peninggalan sejarah yang dapat dikembangkan di Pantai Pulau Datuk, yakni pelabuhan kerajaan, pabrik getah bakau, kantor dagang Inggris, dan kolam renang Belanda (15 September 2012).

Lebih lanjut beliau mengatakan :

Untuk itu, manajemen dalam pengelolaan pariwisata harus lebih ditingkatkan, terutama dari hal-hal kecil seperti kebersihan lingkungan pantai bisa terjaga, keamanan pantai bisa terjamin, pengelola pantai harus jelas sehingga tidak ada kesenjangan sosial dalam pengaturan untuk kontribusi daerah. Oleh dari itu, meskipun sarana dan prasarana belum memadai, serta peran investor yang belum ada, setidaknya instansi terkait perlu membuat perencanaan kedepannya lebih berkembang, seperti melakukan penataan taman, studi banding ke daerah yang lebih berkembang, serta melakukan sosialisasi rutin terjadwal dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat hingga semua orang mengerti manfaat dan tujuan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Kayong Utara (15 September 2012).

Dari sekian banyak penjelasan yang ada, secara umum menunjukkan bahwa dalam pengelolaan pariwisata di Pantai Pulau Datuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara sudah berjalan cukup baik, tetapi masih belum mencapai hasil yang maksimal baik secara efektif maupun efisien.

Begitu pula manajemen yang diterapkan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara, sejauh ini telah berjalan cukup baik, tetapi belum bisa memberikan hasil yang maksimal. Semua hal tersebut dikarenakan oleh kendala-kendala yang mempengaruhi proses pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Adapun kendala-kendala tersebut dapat membuat kurangnya koordinasi antara atasan dan bawahan, sehingga menyebabkan hubungan dalam organisasi menjadi terabaikan. Selain itu juga bisa

menimbulkan kesenjangan sosial antar instansi terkait yang memperebutkan proyek kerja dalam pengelolaan untuk pembangunan pariwisata.

Berkenaan dengan manajemen yang telah diterapkan, ada beberapa hal yang sangat penting fungsinya dalam menentukan arah dan tujuan di suatu organisasi, seperti menurut Handoko (dalam Brantas, 2009:74) yang menyatakan istilah pengorganisasian yaitu :

1. Hubungan antara fungsi, jabatan, tugas karyawan;
2. Cara manajer membagi tugas yang harus dilaksanakan dalam departemen dan mendelegasikan wewenang untuk mengerjakan tugas tersebut.

Berikut maksud dan tujuan dari pernyataan tersebut, serta hubungannya dengan keadaan manajemen yang sudah diterapkan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara dalam pengelolaan pariwisata sebagai berikut :

1. Hubungan antara fungsi, jabatan, tugas karyawan :

Pada dasarnya mengorganisir adalah suatu proses pembagian kerja. Dalam organisasi tersebut tentunya memiliki struktur organisasi yang diatur dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam proses pembangunan sebagai daerah otonom, dan di dalam organisasi tersebut telah ditentukan jabatan-jabatannya.

Jadi, maksud dari hubungan antara fungsi, jabatan, tugas karyawan adalah adanya saling keterkaitan antara tiga unsur tersebut. Dalam hal ini, organisasi memiliki tugas pokok dan fungsi yang dapat dijalankan atau digerakkan oleh setiap orang yang memiliki jabatan-jabatan, dan jabatan tersebut juga memiliki tugas dan fungsi berdasarkan bidangnya masing-masing.

Suatu organisasi tentunya memiliki karyawan-karyawan yang memiliki tugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas atasan demi mencapai tujuan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya

hubungan antara fungsi, jabatan, dan tugas karyawan, karena tugas pokok dan fungsi suatu organisasi tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa ada orang-orang yang menggerakkannya dengan jabatan-jabatan tertentu.

Selain itu juga membutuhkan karyawan-karyawan dengan tugas untuk membantu pelaksanaan sistem kerja yang direncanakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan agar semua tugas dan fungsi organisasi dapat dilaksanakan dengan seimbang dan berjalan dengan lancar sesuai apa yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara sudah menerapkan manajemen organisasi dengan cukup baik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kendala didalam instansi ini, seperti kekurangan pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, kemudian adanya ketidaksesuaian antara jabatan dan bidang yang dimiliki oleh beberapa orang misalnya ada seseorang dengan tamatan sarjana dibidang tertentu tetapi menjabat disuatu organisasi tidak sesuai atau tidak berkaitan dengan tamatan sarjananya.

Menjawab pertanyaan wawancara yang ditujukan kepada salah satu wisatawan lokal dan sekaligus selaku staf pariwisata di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara, yang berkaitan dengan antusiasme warga terhadap pengelolaan pariwisata di Pantai Pulau Datuk Kabupaten Kayong Utara dan peran Pemerintah Daerah, Rendy (29) mengatakan bahwa :

Pada umumnya pengelolaan pariwisata di Pantai Pulau Datuk sangat penting, sebab merupakan tempat wisata dan sebagai aset daerah yang ramai dikunjungi di Kabupaten Kayong Utara. Selain itu, Pantai Pulau Datuk merupakan pantai yang lebih bagus panoramanya dibanding pantai-pantai yang ada di daerah tetangga. Namun, masih banyak warga yang belum bisa ikut mendukung program pembangun daerah ini. Sejauh ini, manajemen dalam pengelolaan pariwisata yang diterapkan oleh pemerintah daerah berjalan dengan cukup

baik tetapi belum maksimal karena masih dalam tahap perencanaan, dan menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Menurut saya, teori manajemen semua orang bisa mengerti, namun dalam penerapannya sangat kurang ditanggapi. Untuk itu, diharapkan juga kesadaran penduduk agar bisa membantu dan mendukung proses pembangunan yang ada di daerah (17 September 2012).

Dari penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa proses pengelolaan pariwisata sudah berjalan dengan cukup baik di Pantai Pulau Datuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, hanya saja masih terdapat kendala-kendala dalam proses pengelolaan yang menghambat pelaksanaan pembangunan secara optimal, sehingga perlu diketahui secara detail faktor-faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan terhadap pengelolaan pariwisata yang ada di Kabupaten Kayong Utara.

2. Cara manajer membagi tugas yang harus dilaksanakan dalam departemen dan mendelegasikan wewenang untuk mengerjakan tugas tersebut :

Seperti halnya pada hubungan-hubungan yang terbentuk di dalam suatu organisasi, cara seorang manajer dalam membagi tugas di suatu organisasi sangat penting untuk menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, seorang manajer harus bijak dalam pembagian tugas kepada karyawannya agar hasil yang ingin dicapai sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditentukan. Dan bukan sebaliknya, pembagian tugas tidak sesuai dengan bidang karyawan yang ditunjuk, sehingga memberikan hasil yang kurang optimal dari tugas yang dipercayakan.

Hal seperti inilah yang bisa menghambat kinerja untuk mencapai hasil yang optimal, karena dari segi bidang yang dikuasai tidak mendukung atau tidak menunjang kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. Dan pada akhirnya, orang tersebut tidak menunjukkan perkembangan pada diri terhadap bidang yang

dikuasainya, melainkan hanya melakukan proses pembelajaran dari awal lagi demi tugas barunya.

Menanggapi hal tersebut, cara Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara dalam manajemen pembagian tugas di instansinya sudah berjalan dengan cukup baik, dan semua tugas pokok yang masuk dalam perencanaan pembangunan daerah sudah dilaksanakan dengan usaha-usaha yang maksimal.

Namun, semua itu belum bisa berjalan dengan sempurna sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan, hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kendala yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaannya, seperti yang ditunjukkan dari data Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara bahwa instansi ini masih kekurangan pegawai.

Keadaan ini juga diperkuat dengan penjelasan dari hasil wawancara kepada H. Gunawan, S.Pd (52) selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara, beliau mengatakan bahwa :

Pelaksanaan tugas pokok merupakan kewajiban utama bagi setiap instansi untuk menyelesaikannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaan tugas tersebut tentunya terdapat masalah atau kendala yang cukup berpengaruh besar bagi kinerja instansi. Diantaranya seperti masalah kurangnya pegawai, sehingga manajemen yang diterapkan tidak berjalan secara optimal, kemudian juga masih adanya pegawai menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya dikarenakan Kabupaten Kayong Utara masih kekurangan sumber daya manusia, sehingga Pemerintah Daerah punya kebijakan untuk menempatkan pegawai-pegawai yang ada untuk melaksanakan tugas pokok instansi demi membantu Pemerintah Daerah terhadap kelancaran pembangunan daerah Kabupaten Kayong Utara (19 September 2012).

Dari penjelasan tersebut, sudah jelas sekali masih banyak kendala yang harus dihadapi oleh instansi terkait maupun Pemerintah Daerah dalam proses pembangunan yang telah dilaksanakan. Dengan keadaan seperti ini, tidak menutup

kemungkinan bahwa Pemerintah Daerah masih butuh banyak waktu untuk membenahi Kabupaten Kayong Utara dalam perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien, agar masyarakat setempat dapat menikmati perkembangan dan kemajuan daerahnya.

Menjawab pertanyaan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengelolaan pariwisata di Pantai Pulau Datuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, Ediansyah (22) sebagai wisatawan lokal dan sekaligus selaku staf administrasi di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kayong Utara mengatakan bahwa :

Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengelolaan oleh Pemerintah Daerah. Diantaranya seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah, dikarenakan minimnya tingkat sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait tentang manfaat dan tujuan pariwisata di Kabupaten Kayong Utara. Kemudian, anggaran juga sangat mempengaruhi dalam memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana. Selain itu, pihak swasta sebagai investor juga sangat berperan penting, sebab dapat mempengaruhi dalam pengembangan usaha-usaha pariwisata di Kabupaten Kayong Utara (11 September 2012).

Untuk mencapai hasil yang maksimal, Pemerintah Daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

D. KESIMPULAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pariwisata di Pantai Pulau Datuk yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara masih dalam proses pelaksanaan pembangunan. Namun, untuk pelaksanaan program yang terencana masih terdapat

masalah yang menjadi penghambat proses pembangunan dalam pengelolaan pariwisata tersebut. Adapun saran dari peneliti terhadap pengelolaan pariwisata yang ada di Kabupaten Kayong Utara sebagai berikut :

1. Perlu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi-instansi lain yang terkait dalam proses pembangunan untuk pengembangan pariwisata, seperti membagi tugas proyek untuk pembangunan pariwisata tersebut. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan proses pembangunan bisa berjalan dengan efektif dan efisien.
2. Melakukan promosi program-program unggulan mengenai objek wisata secara bertahap, serta upaya-upaya lainnya, agar menarik perhatian banyak orang untuk melakukan kegiatan wisata dan terutama bisa menarik perhatian target group (kelompok sasaran) yang dalam hal ini adalah pengusaha pariwisata (investor).
3. Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga harus bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata dengan cara melakukan sosialisasi kegiatan rutin yang menjelaskan dan memberikan gambaran tentang manfaat dan tujuan pengelolaan pariwisata kepada masyarakat, hal ini bertujuan agar masyarakat lebih mengerti manfaat dari sumber daya alam yang dikelola bersama-sama dengan baik dan benar hanya untuk kepentingan umum.

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam melaksanakan penelitian ilmiah ini. Kelemahan tersebut khususnya pada keterbatasan waktu dalam penelitian, wawancara, dan pengumpulan data. Sehingga, hasil yang dicapai oleh peneliti masih belum optimal.

Dalam hal ini, peneliti merasa kurang maksimal untuk menerapkan tahapan penelitian secara detail, sebab waktu untuk melaksanakan penelitian ini sangat

terbatas. Selain itu, peneliti juga merasa kurang maksimal dalam melakukan wawancara, karena sebagian pihak yang menjadi narasumber ialah pejabat Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang tentunya memiliki kesibukan sendiri untuk melaksanakan tugas pokoknya.

Kemudian, peneliti juga merasa masih kekurangan dalam pengumpulan data yang disebabkan oleh waktu yang terbatas. Dari kendala-kendala seperti inilah peneliti merasa masih belum maksimal dalam melakukan penelitian, dan hasil penelitianpun tentunya belum tercapai dengan optimal. Oleh sebab itu, diharapkan penelitian ini dapat disempurnakan oleh peneliti lain dengan metode yang berbeda.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Laporan Akhir. 2009. *Masterplan ODTW Pantai Pulau Datuk Kabupaten Kayong Utara*. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Satori, Djam'an. dan Komariah, Aan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Suwantoro, Gamal. 1997. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta : Andi.
- Yoeti, Oka A. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Angkasa.
- ### Peraturan Perundang-undangan :
- Undang-Undang Otonomi Daerah 2004*. Surabaya : Karina, 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Bandung : Citra Umbara, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan. Jakarta : Harvarindo, 2009.

Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah.* Menteri Dalam Negeri, 2009.

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. *Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan.* Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, 2010.

----- . *Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.* Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, 2011.

Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : AZAN SYAPUTRA
NIM / Periode Lulus : E42008069 / 2012
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : azan_syaputra@yahoo.com / 085215471043

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENGELOLAAN PARIWISATA PANTAI PULAU DATUK OLEH DINAS KEBUDAYAAN
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAYONG UTARA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- Fulltext
 Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui/Disetujui
Pengelola Jurnal... 10/1/2013.....

Drs. H. Agus Eka, M.Si
NIP. 19630123 198810 1 001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 9 Januari 2013


(AZAN SYAPUTRA)